DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995);

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986);

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007);

Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1998);

Idrus, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta : UII Press, 2007);

Soepranto, R. *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2003); Purwono,

Joko. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS-Press. 1995); Soekanto,

Soerjono dan Srimudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001);

Sumardjan, Selo. *perubahan sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada U.P., Yogyakarta, cet.ketiga,1991;

Widodo, Tri. *hukum pertanahan dalam perspektif otonomi daerah*, (navilla Yogyakarta, 2000);

Chomzah, H. Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia*), (Jakarta : Prestasi Pustaka. Jilid I.2004);

Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana,2006);

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 1999);

Santoso, Urip. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif,* Kencana, Jakarta, 2013;

Sudaryatmi, Sri dan Sukirno, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013);

Hidayat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. (Yogyakarta : Liberty, 2000);

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2013);

Mertokusumo, Sudikno. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty, 2011).

B. TESIS

Suhartono, Pengelolaan Tanah Kesultanan (Sultan Grond) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014).

C. INTERNET

www.kemendagri.go,id ;

http://www.jogjaprov.go.id/ ;

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa di akses pada 14 Juni 2016 Pukul 22.00;

http://ask.fm/Faktabahasa_DIY/answers di akses pada 14 Juni 2016 Pukul 22.00;

http://www.jurnalhukum.com/hak-milik di akses pada 14 Juni 2016 Pukul 22.00;

http://hermanussarop.blogspot.co.id/2014/03/asas-pemisahan-horizontaldalam-hukum.html di akses pada 14 juni 2016 pukul 22.00;

https://kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com/2014/05/ di akses pada 4 Agustus 2016 pukul 20.00;

http://www.pewartanews.com/2015/11/otonomi-pertanahan-di-daerah-istimewa.html di akses pada 4 Agustus 2016 pukul 20.00;

http://triwidodowutomo.blogspot.co.id/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.html di akses pada 4 Agustus 2016 pukul 20.00;

https://m.tempo.co/read/news/2015/09/07/058698473/butuh-9-tahun-mendata-tanah-milik-keraton-yogyakarta di akses pada 4 Agustus 2016 pukul 20.00;

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Isimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 *Bab Wewenang Bumi. Bab Amaringake wawenang panggadhuhe bumi serta wawenang panganggo bumi*;

Rijksblaad Kasultanan 1925 Nomor 23 *Bab Wewenang Bumi Pranatan bab maringi wawenang andarbeni lan nganggo bumi.*